

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA JAMBI DI KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah**



Oleh:
MELIANI
NIM: 105180018

Pembimbing:
Dr. H. Husin Bafadhal, Lc., M.A
Nofi Nurman, S.Pd., M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/ 2022 M**

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA JAMBI DI KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah**



Oleh:
MELIANI
NIM: 105180018

Pembimbing:
Dr. H. Husin Bafadhal, Lc., M.A
Nofi Nurman, S.Pd., M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/ 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata I (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juni 2022

Yang Menyatakan



NIM. 105180018



KEMENTERIAN AGAMA
UNISULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi - Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren - Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi di Kota Jambi" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 26 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Agustus 2022



Mengetahui:

Dr. Sayidulna, S.Ag.,M.H
1022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. Marvani, S.Ag.,M.HI
NIP. 197609072005012004

Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M
NIP. 197603262002121001

Penguji I : Alhusni, S.Ag., M.HI
NIP. 197612252009011017

Penguji II : Irsdunas Noveri, S.H
NIP. 197111082014121002

Pembimbing I : Dr. H. Husin Bafadhal, Lc.,M.A
NIP. 197110142003121003

Pembimbing II : Nofi Nurman, S.Pd., M.Si
NIDN. 2010118703

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Al- A'raf:56)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku kepada ibu Nurbaina dan Bapak Azis yang selalu memberikan dukungan moril maupun meteril, yang selalu memanjatkan do'a dan cinta kasih sayang untuk putrinya ini yang tiada mungkin dapat kubalas dengan selebar kertas persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal putrimu untuk membuatmu bahagia. Serta kakakku tercinta Yulisara, S.Pd yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga adikku Kurnia Azizah yang selalu memberi semangat dan doa-doa nya kepada penulis serta nenekku Aisyah yang selalu mendoakan cucunya dan seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan diberikan kemudahan dalam segala hal.

Aamiin..

ABSTRAK

Meliani, NIM: 105180018 “ *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi di Kota Jambi*”

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang RTRW pada pasal 39 mengenai sistem drainase, mengetahui pembangunan sistem drainase di Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi, dan untuk mengetahui faktor pendukung maupun faktor penghambat dari pembangunan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang RTRW mengenai pembangunan Drainase. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Sumber penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara langsung dengan pihak-pihak terlibat yang terkait dengan proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang RTRW mengenai sistem drainase, dan dokumentasi baik berupa file, dokumen, maupun gambar. Pengambilan data dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Penelitian berada di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Kota Baru, dan Kecamatan Jelutung. Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang RTRW tersebut pembangunan drainase yang dilakukan oleh bidang Sumber Daya Air terus dilakukan tiap tahunnya, telah banyak pembangunan yang telah dilaksanakan untuk mengurangi banjir di Kota Jambi, dilihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh Bidang SDA Dinas PUPR Kota Jambi. Namun dalam pembangunan tersebut terdapat beberapa kendala seperti pembebasan lahan, masalah waktu serta masalah dana.

Kata kunci: Implementasi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Drainase

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Abstract

Meliani, NIM: 105180018 “Implementation of Regional Regulation No. 09 of 2013 concerning Regional Spatial Planning for Jambi City in Jambi City”

This thesis aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 09 of 2013 concerning RTRW in Article 39 regarding the drainage system, to determine the development of the drainage system in Jambi City based on Regional Regulation Number 09 of 2013 concerning Regional Spatial Planning of Jambi City, and to determine the supporting and inhibiting factor of development Implementation of Regional Regulation Number 09 of 2013 concerning RTRW regarding Drainage development. This study uses a qualitative research method through a descriptive approach. The sources of this research were obtained by means of observation, direct interviews with involved parties related to the implementation process of Regional Regulation Number 09 of 2013 concerning the RTRW regarding the drainage system, and documentation in the form of files, documents, and images. Data collection was carried out at the Public Works and Public Housing Service. The research location was in 3 sub-districts, namely Alam Barajo District, Kota Baru District, and Jelutung District. In the implementation of Regional Regulation Number 09 of 2013 concerning the RTRW, drainage development carried out by the Water Resources sector continues to be carried out every year, many developments have been carried out to reduce flooding in Jambi City, seen from the many developments carried out by the SDA Division of the City PUPR Office Jambi. However, in the development there are several obstacles such as land acquisition, time problems and funding problems.

Keywords: Implementation, Spatial Planning (RTRW), Drainage

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suah Negeri Sialthaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suah Negeri Sialthaha Saifuddin Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini telah melimpahkan banyak kenikmatan, hidayah dan kasih sayang-Nya ke pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi di Kota Jambi**

Kemudian tidak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan dan kita nikmati pada saat sekarang ini, terang bukan lampu yang menyinari dan bukan pula karena bulan dan matahari, akan tetapi terangnya karena ilmu pengetahuan dan keimanannya.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk itu penulis merasa sangat perlu mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Su'aidi Asy'ari, M.A. Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, S. Th.I., M.A., M.IR., Ph sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ishaq, M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si., MSHS, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. H. Husin Bafadhal, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Nofi Nurman, S.Pd., M.Si selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan dukungan pada saat bimbingan skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Azis dan Ibu Nurbaina selaku orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan doa-doa yang tak henti-hentinya, serta Aisyah selaku nenek saya yang selalu memberikan support dan doa doa kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penulis serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi.

8. Yulisara, S.Pd selaku kakak penulis dan Kurnia Azizah selaku adik penulis yang selalu memberikan dukungan dalam setiap perjalanan kuliah dan memberi semangat dalam hal perkuliahan.
9. Muhammad Raihan Fakhri, Deviana Fitria Wulandari dan Asri Sukmawina sebagai orang-orang yang selalu membantu penulis dalam pembuatan skripsi dan memberikan semangat kepada penulis serta Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Wassalamualaikum wr. Wb

Jambi, 30 juni 2022

Penulis

Meliani

NIM: 105180018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN MUNAQSAH	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Jenis dan Sumber Data	9
4. Instrumen Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
F. Tinjauan Pustaka	13
BAB II Kerangka Teori	16
A. Implementasi Kebijakan.....	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

B. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	22
C. Sistem drainase.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI.....	27
A. Profil lembaga	27
B. Visi dan Misi	30
C. Sasaran	31
D. Lokasi	31
E. Fungsi	35
F. Struktur Organisasi.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Pembangunan Drainase Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 mengenai system drainase di Kota Jambi	37
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Jambi	52
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICULUM VITAE.....

Daftar Tabel

Tabel 1 Rekap pembangunan Bidang Sumber Daya Air	53
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Daftar Gambar

Gambar 1.1 struktur organisasi Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi	38
Gambar 2.1 proses implementasi	40
Gambar 2.2 Peta Sistem Drainase Kota Jambi.....	42
Gambar 2.3 Peta Persebaran Sungai di Kota Jambi.....	43
Gambar 2.4 peta titik lokasi genangan di Kota Jambi	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Daftar Singkatan

RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	: Sumber Daya Air
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rencana Tata Ruang Wilayah di Indonesia dijadikan sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Negara yang dapat dijadikan pedoman Negara dalam perencanaan jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Maka perencanaan tata ruang di Indonesia memiliki tiga tingkatan yaitu rencana tata ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Wilayah negara Indonesia terbagi atas wilayah nasional menjadi suatu kesatuan wilayah provinsi serta wilayah kabupaten/kota yang masing-masing merupakan sub-sistem ruang dari batasan administrasi. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya buatan, menggunakan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Aktivitas pembangunan tersebut tentu saja memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan yang disebutkan. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona awal lingkungan menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan, yang kalau tidak dilakukan penggarapan secara cermat dan bijaksana, hal tersebut akan mengakibatkan kemerosotan kualitas lingkungan, merusak dan bahkan memusnakan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan.

Dengan demikian perencanaan tata ruang, hal tersebut harus berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam secara efisiensi dan efektif, serta

perlu alokasi ruang untuk kegiatan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan alam disertai dengan memperhatikan sumber daya manusia serta aspirasi masyarakat. Apabila pemanfaatan ruang tidak dilakukan penataan dengan baik, kemungkinan akan terjadi kelebihan pemanfaatan ruang serta penurunan kualitas ruang kehidupan. Oleh karena itu perlu penataan ruang sesuai dengan kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan. Karena keterbatasan ruang kewilayahan maka dalam pertumbuhan wilayah agar dapat berkembang menjadi lebih maju, maka akan menyebabkan timbulnya perebutan dalam memanfaatkan ruang dan penggunaan tanah yang dianggap strategi sehubungan dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah yang bernilai atau menguntungkan secara ekonomis, atau wilayah tersebut terletak pada lokasi dan jalur perhubungan yang menguntungkan pemilik lahan.¹

Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dikatakan sebagai arahan bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memanfaatkan ruang di wilayah . Ruang yang dimaksud meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Perencanaan Tata Ruang ini mencakup sistem perkotaan dan jaringan sarana yang mendukung kegiatan di suatu wilayah . Contohnya sistem transportasi, sistem telekomunikasi, sistem kelistrikan, dan sistem sumber daya air.²

¹ Ahok Alpa Beta, "Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 1 (2017): 1–6.

²<https://www.rumah.com/panduan-properti/panduan-lengkap-rencana-tata-ruang-wilayah-8523>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



Acuan penataan ruang di Kota Jambi dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi. Penataan ruang ialah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, serta pengendalian tata ruang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013, tujuan dari penataan ruang yaitu agar dapat mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa berskala nasional yang religius, berbudaya, tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Peraturan daerah ini mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, meliputi Tujuan, Kebijakan dan Strategi, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Penetapan Kawasan Strategis, Arah Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat dan Kelembagaan.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik, tetapi bila dilakukan dengan kurang bijaksana maka tentunya kualitas lingkungan juga akan terganggu. Hal demikian tentunya dengan cara mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, ketepatan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang.

Penataan ruang dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan berbagai bencana lingkungan seperti banjir dan longsor. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mengindahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



kondisi lingkungan dapat menghindari permasalahan lingkungan di masa mendatang. Dengan demikian dibutuhkan sebuah penataan tata ruang yang baik sesuai tuntunan Undang-undang dan Peraturan daerah khususnya di Kota Jambi.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah juga mengatur mengenai rencana sistem drainase untuk Kota Jambi. Rencana Pengembangan sistem prasarana drainase yang dimaksud dalam pasal 39 Perda Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu:

- a. pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase primer dan sekunder,
- b. pengamanan kawasan sekitar jaringan primer dari kegiatan pembangunan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase

Sistem drainase perkotaan mengendalikan pembuangan kelebihan air pada suatu kota melalui cara mengalirkannya melalui permukaan tanah atau lewat dibawah permukaan tanah untuk dialirkan ke badan penerima terdekat. Kelebihan air tersebut dapat berupa air hujan, air limbah domestik maupun air limbah industri. Sistem drainase perkotaan juga berfungsi melindungi sarana dan prasarana perkotaan yang sudah dibangun. Oleh karena itu agar dapat menvegah terjadinya banjir pada daerah perkotaan harus mengacu pada sanitasi, sampah, pengendalian banjir kota dan juga keadaan lingkungan daerah sekitar.

Terjadinya genangan di Kota Jambi ini diakibatkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah menurunnya tingkat layanan sistem drainase Kota Jambi sejalan dengan waktu ditambah adanya kegagalan pengelolaan drainase Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Banyaknya drainase buruk dan pembangunan drainase tertutup diduga sebagai pemicu utama terjadinya banjir yang cukup luas di Kota Jambi. Drainase yang tersumbat akibat material pasir, tanah, sampah, serta bangunan drainase tertutup yang dicor semen membuat air hujan langsung meluap ke jalan maupun permukiman warga. Dengan demikian sistem drainase Kota Jambi yang telah dibangun perlu ditingkatkan fungsinya sehingga kembali seperti semula atau mendekati semula sehingga dapat mengurangi genangan.³

Kota Jambi menurut sumber dari Bidang SDA Dinas PUPR Kota Jambi mempunyai 19 titik genangan yang masih ditangani hingga saat ini, kawasan tersebut terdiri dari Kecamatan Jelutung, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Pasar Jambi dan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Lokasi genangan di beberapa kecamatan tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan kegiatan untuk mengurangi genangan, namun karena ada beberapa kendala yang salah satunya adalah drainase. Drainase yang buruk dapat menjadi pemicu terjadinya genangan yang sering terjadi di Kota Jambi. Drainase yang kecil, terjadinya sedimentasi yaitu tertutupnya saluran akibat adanya pasir, ataupun tanah di saluran air tersebut, dan kurangnya resapan air merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya genangan.

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang Jambi, yang berkaitan dengan permasalahan pembangunan drainase di Kota Jambi, tentang banyaknya permasalahan yang ada di lapangan

³https://sippa.ciptakarja.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/drainase/DRAINASE_15-71-2015.pdf diakses tanggal 9 desember 2021

mengenai drainase. Pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi menyatakan bahwa untuk Kota Jambi permasalahan genangan menjadi satu kesatuan, kapasitas tampung sungai semakin kecil, masih banyaknya sampah yang ditemukan pada pintu air sungai asam dan sungai tembuku. Pembuangan sampah yang sembarangan berhubungan dengan penyebab banjir, hal tersebut karena air hujan tidak dapat mengalir ke sungai jika drainase dan anak-anak sungai terdapat banyak sampah sehingga air hujan tersebut menjadi meluap kedaratan.

Kota jambi khususnya di jalan Kapten Patimura yang berlokasi di depan pom bensin sebelum kuburan cina merupakan salah satu titik lokasi banjir setiap hujan deras melanda kota jambi, air yang menggenang dapat mencapai betis orang dewasa sehingga dapat menyebabkan kendaraan mati dan mogok, Kawasan tersebut .⁴ Selain di daerah simpang pucuk sebelum kuburan cina daerah rawan banjir yang terjadi disepanjang jalan kapten patimura, kenali besar ada di depan freshco supermarket, hujan yang turun diperkirakan berkisar 1 jam sudah dapat membuat air menggenangi jalan raya.

Daerah lain yang sering terjadi banjir yaitu daerah jelutung tepatnya di Jalan Gajah Mada di samping Asrama PM Kecamatan Jelutung. Daerah paling sering terjadi genangan pada Kecamatan Jelutung ada di Kelurahan Lebak Bandung, Payo Lebar dan Handil Jaya, namun Kelurahan Jelutung merupakan wilayah yang paling lama surutnya. Lokasi lain yaitu di Jalan Moh Yamin Kelurahan Payo Lebar. Pada Kecamatan lain Yaitu Kecamatan Kota Baru di Jalan Pangeran Hidayat.

⁴<https://lintastungkal.com/hujan-deras-sejumlah-titik-di-kota-jambi-ini-langsung-banjir-motor-warga-mogok/> diakses tanggal 25 november 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Selanjutnya Pj.Gubernur Jambi Dr.Hari Nur Cahya Murni, M.Si pada saat menghadiri Peringatan HUT ke-75 Pemerintah Kota Jambi, di Abadi Convention Center (ACC), Jumat, (28/5) beliau menyinggung persoalan banjir yang ada di Kota Jambi. Dalam kesempatan ini Pj.Gubernur mengajak pemerintah kota Jambi mempercepat program penanganan banjir.⁵

Pemerintah saat ini sedang konsen dalam pembangunan saluran drainase ,dari uraian diatas sudah tampak jelas kondisi drainase di Kota Jambi perlu mendapat perhatian lebih lanjut, untuk itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian dengan judul **“Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 di Kota Jambi”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengembangan drainase di Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi di Kota Jambi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi yang berkaitan dengan pembangunan drainase?

C. Batasan masalah

Agar penelitian ini tidak melebar penulis akan melihat Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi yang berkaitan dengan pembangunan drainase di Kota Jambi, dan pengambilan data

⁵ <https://jambiprov.go.id/berita-pjgubernur-hadiri-peringatan-hut-kota-jambi.html> di akses tanggal 15 juli 2021



yang dilakukan yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi pada Bidang Sumber Daya Air.

D. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ingin mengetahui pembangunan drainase di Kota Jambi Berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 di Kota Jambi.
- b. Ingin mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang Wilayah Kota Jambi yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Drainase.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap para pembaca khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tentang implementasi perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang Wilayah Kota Jambi.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka mengembangkan keilmuan yang telah di dapat setelah di bangku perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kritikan terhadap Dinas PUPR tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang Wilayah Kota Jambi.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono merupakan penelitian yang meneliti objek alamiah, dalam penelitian kualitatif peneliti berposisi sebagai instrument kunci.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data tentang Implementasi Perda No.9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder

1) **Data primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari aslinya , dalam hal ini peneliti mendapatkan data dari tangan pertama yaitu peneliti. Data yang didapatkan menggunakan cara wawancara, observasi, servei, kuisisioner dan media yang lain.Oleh karena itu data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala Seksi Sungai, Danau dan Rawa Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

2) **Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapatkan bukan langsung dari lapangan melainkan dari sumber perantara misalnya Koran, dokumen dan bacaan lainnya. Data ini diperoleh dari data yang bersumber dari:

- a) Dokumen resmi Kantor DPUPR Kota Jambi
- b) Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi Peneliti
- c) Internet

b. **Sumber data**

Sumber data merupakan subjek atau tempat dimana data penelitian itu diperoleh.Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah dinas terkait, yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala seksi Sungai, Danau dan Rawa Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Instrumen pengumpulan data

Instrument disebut juga sebagai alat pengumpul data. Instrumen merupakan alat yang dibuat untuk penelitian mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.⁶

Ada beberapa instrument pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan bahan-bahan yang dilakukan dengan pengamatan, serta pencatatan secara terstruktur terhadap kejadian yang dijadikan obyek pengamatan dalam penelitian.

Jadi metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

Jadi peneliti akan mengamati tentang Implementasi Perda no. 9 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi di Jalan Kapten Pattimura Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Jalan Gajah Mada dan Hotel Aini Kecamatan Jelutung serta Jalan Gado-Gado dan Jalan Pangeran Hidayat Kecamatan Kota Baru.

b. Wawancara

Interview atau wawancara ialah kegiatan dalam penelitian yang isinya Tanya jawab terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa data-data yang berisi informasi yang berasal dari informan

⁶ Helen Sabera Adib, Teknik Pengembangan Instrumen Penelitian Ilmiah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, *jurnal Unimus*

atau responden. Informan yang dipilih untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dalam mengumpulkan data-data berupa dokumen yang berupa gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷

Dokumen dan arsip berisi hal yang berhubungan dengan fokus penelitian yang berisi sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud merupakan dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audiovisual. Data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah.

5. Teknik analisis data

Analisis data data merupakan proses yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti setelah data-data yang ada telah terkumpul selanjutnya peneliti akan menyusun data-data yang telah diperoleh tersebut agar menjadi jelas, dapat dipahami dan memberikan makna.⁸

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan pengumpulan yang diperoleh atau didapat dari lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya.

2. Mereduksi data

⁷ Ekky Maria Farida Sani, Pemanfaatan Buletin Pustakawan oleh Pustakwandi Kota Semarang, *jurnal ilmu perpustakaan*, Vol. 2, No. 3 (2013)

⁸ Ilham Junaidi, Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata, *Jurnal Kepariwisata*, Vol. 10, No. 1 (2016)

Reduksi data dalam penelitian merupakan kegiatan merangkum, menyederhanakan dan memfokuskan data-data yang telah didapat agar sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau focus penelitian. Tujuan dari mereduksi data ialah agar peneliti mudah dalam mendapatkan gambaran dari data yang telah didapat sehingga mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya.⁹ Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dari hasil data yang diambil berkaitan dengan Implementasi Perda No. 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data telah terkumpul untuk selanjutnya disajikan dalam berbagai bentuk agar dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan.¹⁰

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan atau verifikasi bertujuan mengambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang di peroleh kesimpulan dalam penelitian ini merupakan data yang bersangkutan tentang Implementasi Perda No 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.

F. Tinjauan pustaka

⁹ Mardawarni, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) Hlm. 66-67

¹⁰ Yessi Harnani dan Zulmeliza Rasyid, *Statisti dasar kesehatan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) Hlm. 14

Tinjauan pustaka merupakan uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti.

Pertama, Skripsi Randy Syaputra Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi, penelitian ini membahas tentang kinerja Pemerintah Kota Jambi dalam terwujudnya Implementasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah direncanakan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan Kualitatis dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian Implementasi rencana tata ruang wilayah kota jambi belum sepenuhnya di laksanakan sebagai mestinya, seperti halnya pembangunan dan alih fungsi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW masih banyak terjadi, seperti Mall ,hotel, ruko yang berserakan di kota jambi, serta pemanfaatan ruang di kota jambi belum memperhatikan Analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Dani Andriyanto yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (studi kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir). Penelitian ini bersifat Deskriptif dan metode yang digunakan peneliti adalah metode interview dan dokumentasi data yang diperoleh dan dianalisis secara teliti.

Hasil penelitiannya adalah implementasi Peraturan Daerah RTRW pada system pengendalian banjir telah dilaksanakan dengan baik namun belum

maksimal dilakukan. Tidak terjangkaunya pembangunan-pembangunan drainase secara keseluruhan serta terbatasnya media sosialisasi yang dilakukan yang menyebabkan belum maksimal. Factor penghambat dari implementasi RTRW ini adalah keterbatasan anggaran dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Ketiga, Skripsi Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tentang Pembangunan Drainase Tahun 2014-2018 oleh Mustakim mahasiswa Universitas Isam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Penelitian ini menggunakan penelitian gabungan, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Metode yang digunakan ialah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, sumber data yang digunakan oleh peneliti ini yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah kinerja pemerintah Kota Jambi dalam pembangunan drainase sudah berjalan searah dengan yang isi tertulis di peraturan daerah Kota Jambi tentang perencanaan tata ruang nomor 9 tahun 2013 akan tetapi belum moptimal karena masih banyak ditemukan adanya kendala. Kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi dalam mengerjakan Pemeliharaan Drainase adalah Pembebasan lahan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan terlebih mengenai untuk tidak membuang sampah di saluran drainase atau saluran pembuangan air dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

BAB II KERANGKA TEORI

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi meneliti berbagai pendekatan yang beragam untuk menganalisis berhubungan dengan bagaimana kebijakan itu terlaksanakan. Implementasi berasal dari kata “*to implement*” yang artinya mengimplementasikan. Menurut definisi literal yang dimaksud dengan Implementasi adalah penerapan dari suatu kegiatan.

Penelitian tentang implementasi telah banyak dilakukan khususnya di lingkungan akademisi ilmu pemerintahan. Konsep maupun teori tentang Implementasi kebijakan terus berkembang hingga kini dan sangat variatif. Genest-Grégoire, Antoine Charbonneau, Étienne Bromberg, Daniel E berpendapat bahwa Implementasi adalah pemahaman yang terjadi direncana, dirumuskan, dan rencana tersebut menjadi fokus proses implementasi kebijakan rancangan pemerintah.¹¹

Sedangkan menurut Sinclair, Peter Kable, Ashley Levett-Jones, Tracy berpendapat bahwa implementasi adalah “*Those Activities directed towards putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).¹² Kemudian menurut teori Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat,

¹¹ Genest-Gregoire (dkk), *Asumsi Keberlanjutan dalam Reformasi Manajemen Performance: Merevisi Pola Pelaksanaan*, Tinjauan Organisasi Publik, 23 (Agustus), 2018.

¹² Sinclair P (dkk), *Efektifnya e-learning berbasis Internet tentang Perilaku Dokter dan Hasil Pasien: protokol peninjauan sistematis*, database JBI dari tinjauan sistematis dan laporan implementasi, Januari, 2015.

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan.

Berdasarkan berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan rencana yang akan dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga, terutama kebijakan dan rencana yang berhubungan dengan lembaga nasional, serta mencakup sarana dan prasarana pendukung rencana yang akan dilaksanakan.

Implementasi kebijakan merupakan perwujudan dari keputusan kebijakan dasar yang biasanya terdapat dalam undang-undang. Namun selain itu, dapat juga berupa petunjuk administratif penting atau keputusan legislatif. Idealnya, keputusan ini menjelaskan masalah yang akan ditangani dan menentukan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dan menyusun proses implementasi dengan berbagai cara. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Secara sederhana implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya mengacu pada bagaimana melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuannya. Implementasinya bersifat sangat interaktif dengan aktivitas kebijakan sebelumnya. Menurut Howlett dan Ramesh mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "*The process whereby*



programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice”(Proses dimana program atau kebijakan dijalankan; itu menunjukkan penerjemahan rencana dalam praktik).¹³ Oleh karena itu, implementasi kebijakan adalah dengan menjalankan isi dari kebijakan tersebut ke dalam program aplikasi yang dibutuhkan oleh kebijakan itu sendiri.

Menurut Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan putusan yang biasanya berbentuk undang-undang, namun bisa juga berupa intruksi-intruksi atau ketentuan-ketentuan eksekutif yang penting ataupun ketentuan badan peradilan. Pada umumnya, ketentuan tersebut menentukan masalah yang akan diselesaikan, secara jelas menyatakan tujuan atau target yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur jalannya prosedur implementasi.

Menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan harus jelas serta terukur sehingga dapat dicapai. Apabila standar dan tujuan kebijakan itu tidak jelas, akan ada banyak penjelasan, serta mudah menyebabkan terjadinya konflik di antara lembaga pelaksana. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa cara untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan yaitu dengan cara standar dan target sasaran tertentu yang harus untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan, pada dasarnya kinerja kebijakan adalah penilaian atas tingkat ketercapaian dalam standar dan

¹³ Leo Agustino,PH.D, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 128.

sasaran tersebut. Implementasi kebijakan akan gagal jika para pelaksana, kurang menyadari terhadap standar dan sasaran tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan sikap terhadap para pelaksana. Arah sikap (disposisi) para pelaksana (implementors) dengan standar dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang penting. Implementors/pelaksana akan menjadi gagal dalam mewujudkan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

2. Sumber daya

Implementasi dan kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Setiap urutan implementasi mengharuskan agar adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepada mereka oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Manusia sebagai sumber daya yang utama dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, hal itu dikarenakan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia terutama sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi perhitungan yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan juga penting dari komunikasi. Dalam Sumber daya kebijakan ini diharuskan tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terbagi atas dana atau insentif lain untuk memperlancar pelaksanaan implementasi dalam suatu kebijakan. Kurangnya atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

keterbatasan dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakan, merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Terdapat dua karakteristik organisasi pelaksana. Dalam hal ini karakteristik utama dari struktur birokrasi ialah prosedur-prosedur kerja standar (SOP= Standard Operating Procedures) dan fragmentasi.

- a. Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan untuk respon internal terhadap suatu keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan agar keselarasan dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.
- b. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti kelompok-kelompok kepentingan, pejabat pejabat eksekutif, konstitu komite-komite legislatif, Negara dan sifat kebijakan yang dapat mempengaruhi organisasi birokrasi public.

4. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan lembaga lain. Agar rencana tersebut berhasil, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi. Dalam suatu organisasi publik, komunikasi yaitu proses yang sulit dan komplek. Proses pemindahan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan, baik gangguan yang disengaja maupun tidak. Apabila sumber komunikasi yang berbeda dapat memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standard dan tujuan, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

sumber informasi sama dalam memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu waktu pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit agar bisa melakukan suatu kebijakan secara intensif. Sehingga, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency). Disamping itu, koordinasi juga merupakan suatu mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahannya akan semakin kecil, demikian sebaliknya.¹⁴

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Hornt: sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang akan dilaksanakan bukanlah suatu hasil formulasi warga setempat yang akan mengenal betul suatu permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Dari berbagai pandangan, Implementasi kebijakan merupakan perwujudan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar yang biasanya tercantum di dalam undang-undang. Idealnya, Implementasi Kebijakan ini menjelaskan keputusan

¹⁴ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Implementasi Program Emas (Expanding Maternal and Neonatal Survival) Sebagai Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Tegal, Journal of Politic and Government Studies, 2016.

terhadap masalah yang akan ditangani dan menentukan tujuan yang diterjemahkan melalui peraturan kemudian dipraktekkan melalui bentuk tindakan.

B. Rencana Tata Ruang Wilayah

Menurut Perda Nomor 09 Tahun 2013 ruang merupakan wadah yang terbagi atas ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Rencana Tata Ruang merupakan hasil dari perencanaan tata ruang, yang merupakan proses untuk menentukan struktur tata ruang dan pola ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan tata ruang.¹⁵

Pengertian Tata Ruang menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 yaitu wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang merupakan suasana pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang dapat berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hirarkis mempunyai hubungan fungsional¹⁶

Rustiadi et al menyatakan bahwa pentingnya penataan ruang dapat dibedakan atas tiga, yaitu:

1. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya,
2. wujud distribusi sumberdaya,
3. dan keberlanjutan.¹⁷

Perencanaan tata ruang wilayah mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

¹⁵ Perda Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033

¹⁶ Undang-undang nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

¹⁷ Riswandi Umar, Implementasi Rencana Tata Ruang Permukiman Dan Arahan Kebijakan Pembangunan Di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

- a) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- b) Sebagai rujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota
- c) Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengemangan wilayah kota
- d) Pedoman sebagai penyusunan rencana tata ruang wilayah kota
- e) Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- f) Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota
- g) Pedoman dalam administrasi pertanahan¹⁸

Jenis Rencana Tata Ruang Wilayah terbagi atas 3 yaitu:

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), perencanaan tata ruang wilayah nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Tujuan, arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Negara yang dijadikan pedoman untuk perencanaan jangka panjang. Struktur ruang wilayah nasional meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energy dan sumber daya air.

¹⁸ <https://www.otosia.com/berita/rencana-tata-ruang-wilayah-pengertian-fungsi-jenis-dan-manfaat-klm.html> diakses tanggal 16 November 2021

b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) merupakan perencanaan tata ruang wilayah dalam wilayah provinsi dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional. Rencana struktur ruang wilayah provinsi terdiri atas sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan.

c) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, merupakan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, penataan ruang ini meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota berfungsi sebagai:

- 1) Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah Kabupaten/Kota.
- 2) Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota
- 3) Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah¹⁹

Tata cara penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

- a) Persiapan yang terdiri dari pembentukan tim penyusun, kajian awal data sekunder, persiapan teknis pelaksanaan dan pemberitaan kepada public, persiapan dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan.
- b) Pengumpulan data dan informasi primer dan sekunder, dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan.

¹⁹<http://dinaspupr.bandacehkota.go.id/2020/06/27/pengertian-dan-jenis-jenis-perencanaan-tata-ruang/> diakses tanggal 17 November 2021

- c) Pengolahan dan analisis data dapat diselesaikan dalam waktu 5 bulan dan meliputi kebijakan spasial dan sektoral, kedudukan dan peran daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota dalam wilayah. Serta meliputi fisik wilayah, sosial kependudukan, ekonomi wilayah dan lingkungan hidup.
- d) Penyusunan konsep yang terdiri atas alternative konsep rencana, pemilihan serta perumusan rencana terpilih. Dapat diselesaikan dalam waktu 5 bulan.
- e) Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan.²⁰

C. Sistem Drainase

Kata drainase berasal dari bahasa Inggris yaitu *drainage* yang artinya mengeringkan atau mengalirkan. Agar tidak mengganggu aktifitas kawasan dan fungsi lahan sistem drainase digunakan sebagai serangkaian bangunan air yang berguna untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan.²¹ Drainase dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan pada kawasan atau lahan yang dialiri air dan sebuah metode atau siasat yang dibuat untuk mengatur tentang masalah kelebihan air, baik air yang berada di bawah tanah maupun di permukaan tanah. Kelebihan air disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan akibat dari durasi hujan yang lama.

²⁰ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 1 Tahun 2018

²¹ M. Farqi Khair, EVALUASI SISTEM DRAINASE DI KAWASAN SEKITAR STADION TELADAN KOTA MEDAN

Drainase menurut Suripin merupakan suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik air yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan/lahan tidak terganggu dan sistem drainase secara umum dapat dikatakan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.²²

Saluran drainase perkotaan terdiri dari saluran

- 1) Saluran primer, adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima. Dimensi saluran primer tergantung pada debit air yang mengalir dari drainase sekunder dan tersier. Letar saluran primer berada paling hilir dan mengarah langsung ke badan air. Drainase primer dapat berupa kanal, kali, atau anak sungai.
- 2) Saluran sekeunder, adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer
- 3) Saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap menyalurkannya ke saluran sekunder²³

²² Yudi Mardiansyah, EVALUASI SISTEM DRAINASE KAMPUS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

²³ Permen PU No 12 Tahun 2014 Tentang Drainase perkotaan

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi

1. Profil Lembaga

Bidang Sumber Daya Air merupakan salah satu bidang yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Sumber Daya Air, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi. Bidang mempunyai tugas yang meliputi;

- a. Drainase dan irigasi
- b. Sungai, danau, dan rawa
- c. Operasional dan pemeliharaan
- d. Serta pelaksanaan tugas lainnya yang telah diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Sumber Daya Air memiliki fungsi dalam tugasnya diatur pada pasal 22 ayat (3) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan pembangunan dan pemeliharaan teknis bidang sumber daya air
- b. Penyusunan bahan koordinasi teknis dibidang sumber daya air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengawasan, pengendalian serta pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air.

Penanggulangan kerusakan bangunan air akibat erosi dan bencana alam.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Sumber Daya Air dibantu oleh tiga kepala seksi, beberapa orang ASN dan Non PNS, yaitu :

1. Kepala Seksi Drainase dan Irigasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi drainase dan irigasi;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase dan irigasi;
 - c. Membentuk dan memberdayakan P3A/GP3A/IP3A, pengendalian pemanfaatan daerah sempadan saluran, optimalisasi pendayagunaan saluran irigasi dan pengembangan/rehabilitasi/pembinaan jaringan irigasi tingkat petani/jaringan tersier;
 - d. Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase dan irigasi;
 - e. Mengatur tata guna air pada jaringan irigasi;
 - f. Melaksanakan study kelayakan di bidang sumber daya air;
 - g. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
2. Kepala Seksi Sungai, Danau dan Rawa, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja seksi Sungai, Danau dan Rawa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- b. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan embung, penghijauan pada daerah aliran sungai, danau;
- c. mengendalikan pencemaran pada sungai, danau/situ;
- d. menetapkan dan mengelola Kawasan lindung, sumber air dan konservasi lainnya;
- e. melakukan dan mengendalikan kegiatan pengendalian banjir, pembangunan/rehabilitasi tanggul, pembangunan rehabilitasi pengaman tebing sungai, pengarah aliran dan pembangunan pengamanan /pengendali banjir lainnya;
- f. membantu pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan seksi sungai, danau dan rawa;
- g. memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana kegiatan pembangunan embung, dan penghijauan pada daerah aliran sungai, danau;
- h. membuat laporan bulanan dan tahunan;

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi operasi dan pemeliharaan;
- b. Melaksanakan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan serta menetapkan ijin penatagunaan sumber daya air;
- c. Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan operasional;
- d. Membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pembangunan bangunan air dan drainase
- e. Meneliti kondisi bangunan air dan drainase;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- f. Membuat daftar inventarisasi areal dan data bangunan air, drainase dan daerah aliran sungai (DAS);
- g. Membantu penanggulangan kerusakan bangunan air dan drainase akibat erosi dan bencana alam;
- h. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.²⁴

B. VISI & MISI

Dalam mengerjakan tugas-tugasnya bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi berpedoman kepada visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi, yaitu “**Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas**”.

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi mengurutkannya kedalam misi, yaitu:

1. Terwujudnya kualitas infrastruktur peran yang memadai,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman dan fasilitas umum,
3. Terwujudnya kesesuaian penataan ruang dan bangunan.

C. SASARAN

²⁴ Peraturan Wali Jambi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi

Adapun sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Jambi Kota Jambi sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib administrasi perkantoran.
2. Terwujudnya sarana prasarana aparatur untuk meningkatkan kinerja.
3. Terencana, Terbangunnya dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sarana dan prasarana dasar lingkungan.
4. Terbangunnya jaringan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas.

D. Lokasi Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi pada awal berdiri berada di Benteng, Lokasi SD alfalah pada masa sekarang, kemudian pindah lokasi di Jalan Pangeran Hidayat, dekat Majid Al Mina dengan cara mengontrak, kemudian sejak tahun 1990 Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Jambi mempunyai tetap di Jalan Zainir Havis No. 04 Paal Lima, Kota Baru, Kota Jambi.

Lokasi Penelitian yang pertama yaitu di daerah sepanjang Jalan Kapten Patimura tepatnya berada didepan SPBU Simpang Pucuk atau lorong UPCA dan didaerah Minimarket Freshco Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Kecamatan Alam Barajo terletak di Barat Kota Jambi, batas-batas Kecamatan Alam Barajo adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Telanaipura
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Baru



4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember 2014, Kecamatan Kotabaru dipecah menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Alam Barajo hal tersebut resmi dipecah pada Tahun 2016. Dengan masing-masing kecamatan memiliki 5 kelurahan. Tidak terdapat pembentukan kelurahan yang baru. Hanya membagi 10 kelurahan tersebut menjadi masing masing 5 kelurahan dalam 1 kecamatan.

Wilayah Kecamatan Alam Barajo Terdiri Dari 5 Kelurahan:

1. Kelurahan Kenali Besar Dengan Luas 11,28 Km² (27.10% Dari Luas Kecamatan)
2. Kelurahan Rawasari Dengan Luas 7,40 Km² (17.78 % Dari Luas Kecamatan)
3. Kelurahan Bagan Pete Dengan Luas 17,45 Km² (41.92 % Dari Luas Kecamatan)
4. Kelurahan Beliung Dengan Luas 1,61 Km² (3.86 % Dari Luas Kecamatan)
5. Kelurahan Mayang Mengurai Dengan Luas 3,89 Km² (9.34 % Dari Luas Kecamatan).

Lokasi genangan yang selanjutnya yaitu berada di Jalan Pangeran Hidayat tepatnya di Jalan Gado-gado kecamatan Kotabaru berlokasi di Barat Kota Jambi, dengan ketinggian rata-rata 15 m dari permukaan air laut. Batas-batas Kecamatan Kota baru yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Telanaipura
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jelutung dan Jambi Selatan
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Alam Barajo

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi (PERDA) nomor 13 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014, Kecamatan Baru di pecah menjadi 2 Kecamatan. Kecamatan KotaBaru resmi dipecah menjadi Kecamatan KotaBaru dan Kecamatan Alam Barajo pada Tahun 2016. Dengan masing masing kecamatan memiliki 5 kelurahan. Tidak terdapat pembentukan kelurahan yang baru, Hanya membagi 10 kelurahan tersebut menjadi masing masing 5 kelurahan ke dalam Kecamatan Baru dan Kecamatan Alam Barajo.

Kecamatan Kota baru mempunyai keadaan wilayah yang datar dan sedikit berbukit dengan luas 36,11 Km² dan terdiri dari 5 Kelurahan:

1. Kelurahan Simpang III Sipin dengan luas 2,91 Km² (8,06% dari luas Kecamatan).
2. Kelurahan Suka Karya dengan luas 1,92 Km² (5,32% dari luas Kecamatan).
3. Kelurahan Kenali Asam Bawah dengan luas 16,51 Km² (45,72% dari luas Kecamatan).
4. Kelurahan Kenali Asam Atas dengan luas 7,43 Km² (20,58% dari luas Kecamatan).
5. Kelurahan Paal V dengan luas 7,34 Km² (20,33%)

penduduk Kecamatan Kota Baru tercatat sebanyak 78 619 jiwa dimana penduduk laki-laki 39 785 jiwa dan 38 834 jiwa Dilihat dari kepadatan penduduk,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



rata-rata kepadatan sebesar 2177 orang/km² dengan rincian per kelurahan sebagai berikut:

1. Simpang III Sipin = 8 228 org/km²
2. Suka Karya = 5 340 org/km²
3. Kenali Asam Bawah = 1 281 org/km²
4. Kenali Asam Atas = 1 036 org/km²
5. Paal Lima = 2 122 org/km²²⁵

Lokasi genangan berikutnya yaitu pada Kelurahan Jelutung tepanya di Jalan Gajah Mada dan di Hoel Aini Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jelutung terletak di tengah tengah Kota Jambi, mempunyai ketinggian rata-rata 10 m dari permukaan air laut. Batas-batas Kecamatan Jelutung adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pasar Jambi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Baru
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jambi Timur
4. Sebelah Barat berbatas dengan Jambi Selatan

Kecamatan Jelutung memiliki keadaan wilayah yang datar dan sedikit berbukit dengan luas 7,92 Km² dan terdiri dari 7 Kelurahan:

1. Kelurahan Handil Jaya dengan luas 0,95 Km² atau 11,99% dari luas kecamatan.

²⁵ <https://jambikota.bps.go.id> diakses tanggal 7 juni 2022

2. Kelurahan Kebun Handil dengan luas 1,13 Km² atau 14,27% dari luas kecamatan.
3. Kelurahan Jelutung dengan luas 1,46 Km² atau 18,43% dari luas kecamatan.
4. Kelurahan Payo Lebar dengan luas 1,23 Km² atau 15,53% dari luas kecamatan.
5. Kelurahan Lebak Bandung dengan luas 2,01 Km² atau 25,38% dari luas kecamatan.
6. Kelurahan Cempaka Putih dengan luas 0,70 Km² atau 8,84% dari luas kecamatan.
7. Kelurahan Talang Jauh dengan luas 0,44 Km² atau 5,55% dari luas kecamatan.

E. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok maka Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Jambi mempunyai fungsi :

1. Penjabaran kebijakan teknis pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
2. Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dibidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, angkutan serta alat berat dan bina program dan penataan ruang
3. Perencanaan program dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Pembinaan, pengendalian serta pengawasan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

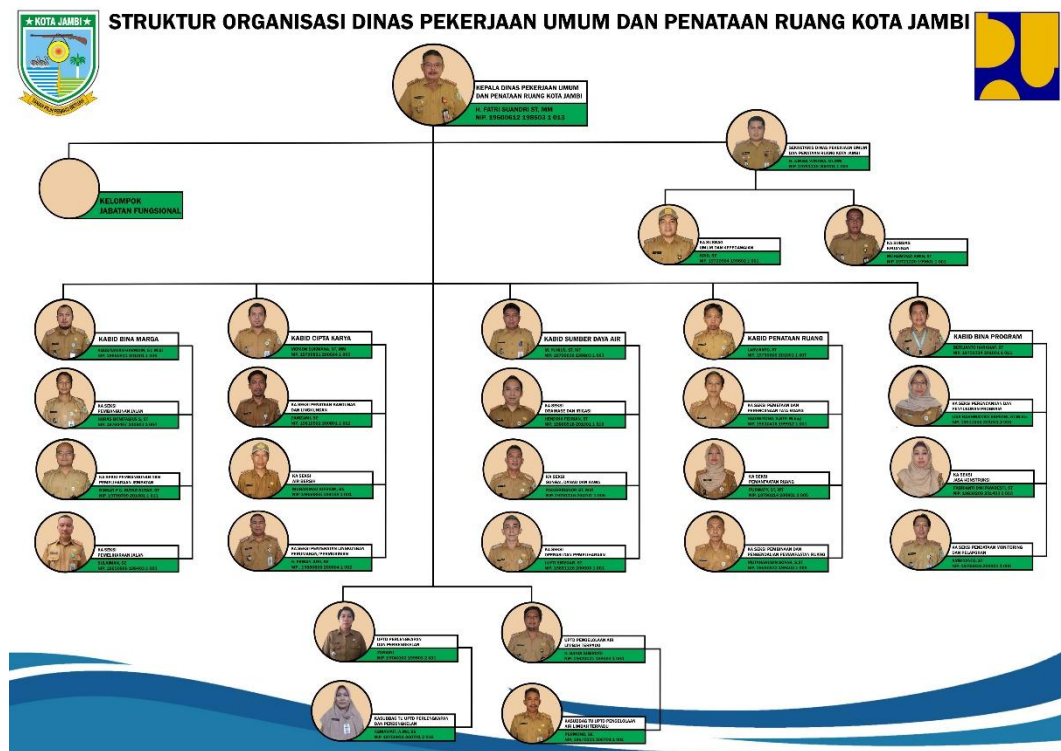
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



5. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintahan maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas

F. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi

Gambar 1.1 struktur organisasi Dinas PUPR Kota Jambi²⁶



²⁶ Arsip Bidang SDA Dinas PUPR Kota Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembangunan drainase di Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi di Kota Jambi

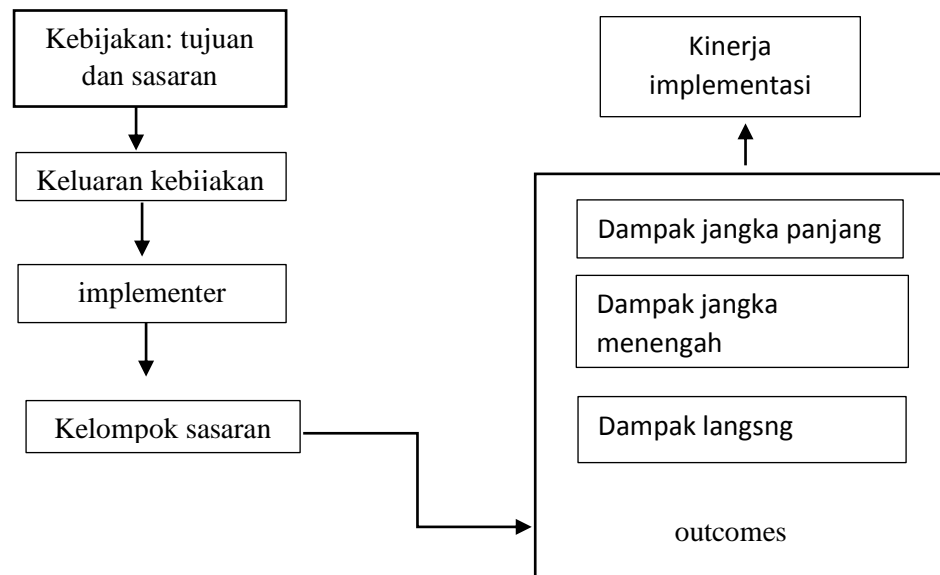
Perumusan dan implementasi kebijakan yang baik, sangat penting untuk menjamin Kinerja Pemerintah, ketertiban pemerintah serta memandu pemerintah menuju pembangunan yang lebih baik. Kebijakan merupakan dasar yang memberikan arah bagi program atau mencapai tujuan. Jika disepakati bahwa cara memandang keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementer saja tetapi juga hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani sehingga upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dicermati secara lebih detail dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementer dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Cara untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan yaitu dengan menggunakan target dan standar sasaran tertentu yang harus untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan, pada dasarnya kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap tingkat ketercapaian dalam standar dan sasaran tersebut. Implementasi kebijakan akan gagal jika para pelaksana, sepenuhnya kurang menyadari terhadap standar dan sasaran tujuan kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 2.1 proses implementasi



Gambar diatas mennerangkan bahwa proses implementasi berawal dari adanya suatu kebijakan atau program. Pada dasarnya suatu kebijakan atau program dibuatkan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk mecapai tujuan tersebut jadi suatu kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan (policy input). Masukan kebijakan yang umum dogunakan untuk mencapai tujuan kebijakan publik ialah berupa anggaran, misalnya : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai berbagai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah serta Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai berbagai kebijakan yang dibuatkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Pembangunan drainase yang terdapat pada pasal 39 di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 tahun 2013 Tentang RTRW yang di dalam pasal tersebut mempunyai tugas dan program utama adapun program-program utamanya antara lain:

- a. Pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase, adapun focus lokasinya adalah Sistem drainase Primer serta Sekunder, Dan bentuk kegiatannya dari pengembangan dan pemeliharaan adalah Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan drainase.
- b. Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase, adapun focus pengerjaannya adalah Sistem jaringan drainase primer, serta bentuk kegiatannya adalah Studi Zoning Regulations kawasan sekitar jaringan drainase.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase, dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembentukan komunitas.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan , lokasinya terdapat di Kecamatan Telanaipura, Kecamatan pasar Jambi, kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan pelayangan. Seta bentuk kegiatannya Zoning Regulations.

Indikator yang digunakan pada pengukuran kinerja Pemerintah Jambi dalam membangun drainase adalah indikator: kualitas pembangunan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

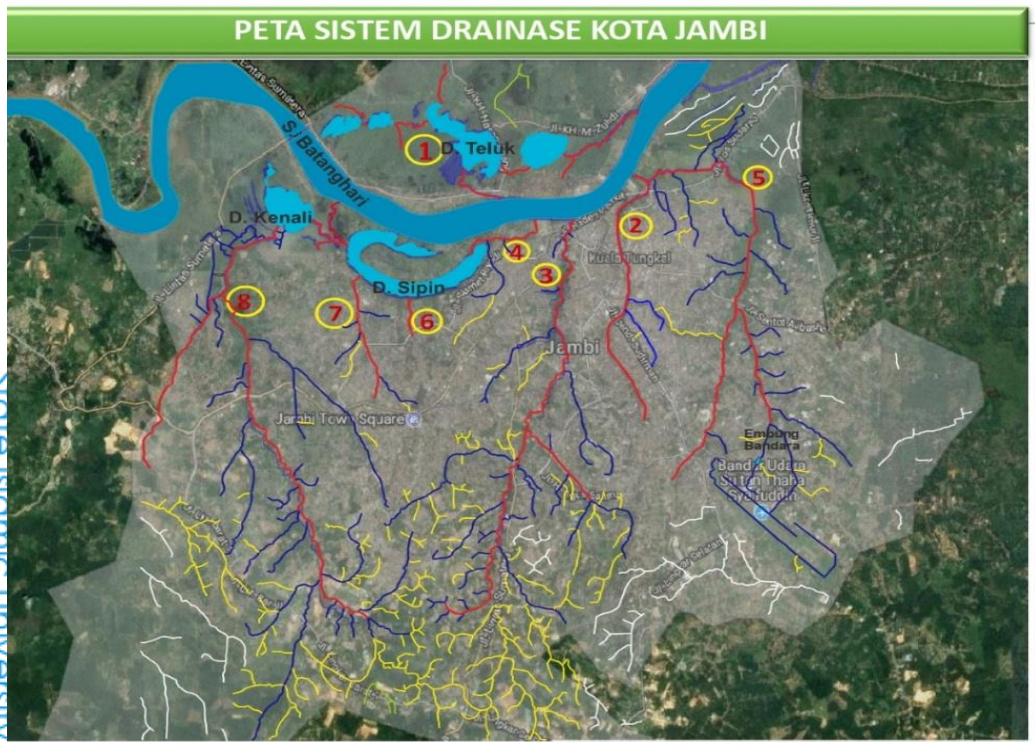
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Indikator ini dipilih karena ke 5 indikator tersebut diperkirakan dapat berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai bagaimana kinerja Pemerintah Jambi dalam membangun drainase baik dari sisi internal maupun eksternal. Sehingga dengan melihat indikator-indikator tersebut dapat diketahui apakah kinerja Pemerintah Jambi dalam membangun drainase Jambi telah berhasil apa belum.

2.2 Gambar peta sistem drainase drainase kota jambi²⁷



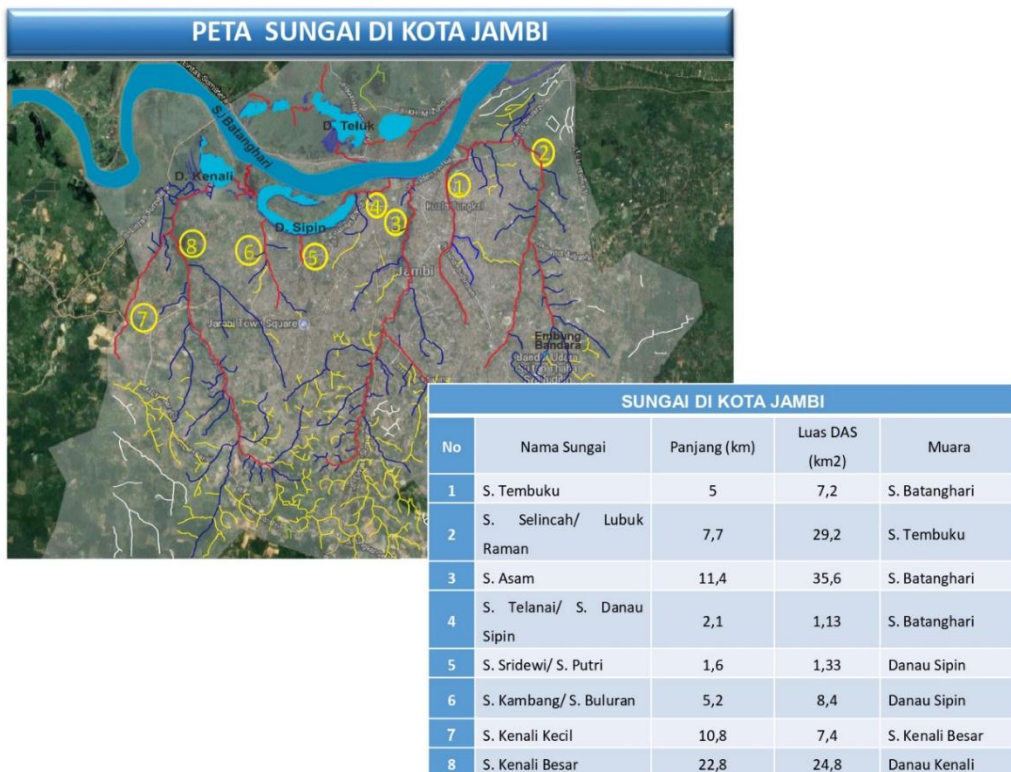
Sistem drainase perkotaan merupakan prasarana yang yang terdiri atas kumpulan sistem saluran didalam kota yang berfungsi untuk mengeringkan lahan perkotaan dari 1 page 2 banjir/genangan akibat dari hujan dengan cara

²⁷ Arsip Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi



mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem saluran-saluran tersebut. Kewenangan pada sistem drainase perkotaan Kota Jambi pada gambar tersebut digambarkan melalui warna-warna yaitu warna merah, biru, kuning dan putih.

2.3 Peta Persebaran Sungai di Kota Jambi²⁸



Persebaran sungai kota jambi ada 9 sungai:

1. Sungai Tembuku sepanjang 5km bermuara ke Sungai Batanghari
2. Sungai Selincah/Lubuk Raman sepanjang 7,7kn yang bermuara ke Sungai Tembuku

²⁸ Arsip Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

3. Sungai Asam sepanjang 11,4km yang bermuara ke Sungai Batanghari
4. Sungai Telanai/ Sungai Danau Sipin yaitu sepanjang 2,1km yang bermuara ke Sungai Batanghari
5. Sungai Sridewi/ Sungai Putri sepanjang 1,6km yang menjadi aliran sungai terpendek dari semua sungai di Kota Jambi yang bermuara ke Danau Sipin
6. Sungai Kambang/ Sungai Buluran sepanjang 5,2km yang bermuara ke Danau Sipin
7. Sungai Kenali Kecil sepanjang 10,8 km yang bermuara ke Sungai Kenali Besar
8. sungai Kenali Besar sepanjang 22,8 km yang bermuara ke Danau Kenali

Dari 8 sungai yang ada di Kota Jambi 3 sungai yaitu Sungai Tembuku, Sungai Asam, Sungai Telanai/ Sungai Danau Sipin bermuara ke Sungai Batanghari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Gambar 2.4 titik lokasi genangan banjir Kota Jambi²⁹



Gambar diatas merupakan titik lokasi genangan banjir yang menjadi wilayah yang ditangani oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi. Wilayah tersebut merupakan daerah yang hingga saat ini masih menjadi daerah rawan genangan banjir.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUPR telah membuat kajian tentang jumlah titik genangan di Kota Jambi. Kajian itu disebut Masterplan yang telah dilakukan sejak tahun 2006, dan terdapat sebanyak 19 titik genangan banjir di Kota Jambi. Dinas PUPR optimis menyelesaikan ke-19 titik genangan tersebut

²⁹ Arsip Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi

selama satu periode Walikota. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh M Yunius sebagai Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kota Jambi “ hal tersebut akan kita strategikan 5 tahun ini akan selesai. Ini sudah memasuki tahun ke-4 untuk kita selesaikan”

M Yunius menjelaskan jika pada tahun ini permasalahan pada genangan tersebut telah menyelesaikan 13 genangan. Selesai yang dijelaskan tersebut dalam artian melancarkan air dan kategori air mengalir normal, namun untuk dalam artian selesai sesungguhnya, hal tersebut belum bisa direalisasikan karena hal tersebut akan mengarah pada konstruksi pembangunan dan tentu memerlukan biaya yang besar untuk menyelesaikannya. Titik genangan berhubungan satu dengan yang lain. Akibat satu titik yang bermasalah maka akan berpengaruh ketitik lainnya.

Berikut ini 19 titik lokasi genangan di Kota Jambi

1. Belakang Kantor Lurah Murni, Kecamatan Danau Sipin
2. Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung
3. Hotel Aini, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung
4. Lapas Kelas II. A Jambi
5. Jl. Kaca Piring, Perum. Pemda, Kelurahan Simpang IV Sipin, Telanaipura
6. Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo
7. RT 12 Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur
8. Belakang Hotel Makmur, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi
9. Belakang Klenteng, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur
10. RT 29 Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah



11. Belakang Trona, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung
12. Jl. Yusuf Nasri Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan
13. Samping Asrama PM, Jl. Gajah Mada Kelurahan Jelutung
14. RT 13 Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan
15. SPBU Jl. Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo
16. Belakang Jamtos, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo
17. Jl. H Juanda, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru
18. Lorong Gado-Gado Paal VII Kota Baru
19. RT 25 Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan

Pada kesempatan wawancara dengan Pak Padjerosnop selaku Kepala Seksi Sungai Danau dan Rawa

Kami punya 19 titik genangan banjir yang kami kelola, kami punya target per tahun berapa untuk pengurangan intensitas banjirnya sampai akhir program pak walikota dan wawako. Upaya untuk mengurangi banjir tersebut terus kita laksanakan.³⁰

Dari wawancara bersama Pak Padjerosnop tersebut saat ini Kota Jambi memiliki wilayah yang menjadi lokasi genangan banjir setiap datangnya hujan, dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kota Jambi saat ini masih memiliki 19 titik genangan banjir. Namun dari pernyataan Pak Padjerosnop selaku Kepala Seksi Sungai Danau dan Rawa, upaya untuk menanggulangi banjir pada wilayah tersebut terus dilakukan hingga saat ini. Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang SDA Dinas PUPR Kota Jambi adalah membersihkan drainase dan anak-anak sungai yang pada saat banjir daerah tersebut merupakan daerah rawan banjir.

³⁰ wawancara dengan Pak Padjerosnop selaku Kepala Seksi Sungai Danau dan Rawa

Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pembersihan pada drainase yang terdapat tumpukan sampah maupun sedimentasi pada drainase tersebut.

Upaya pencegahan banjir dilakukan dengan cara Wawancara bersama Bapak M. Yunius selaku Kepala Seksi Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi mengatakan “Pekerjaan rutin bidang SDA apabila ada laporan mengenai banjir atau pengaduan ada banjir yang di akibat sampah/sedimentasi itu ada timnya. Tapi kalo bidang SDA itu mengarah ke sungai-sungai nya.”³¹

Dari penyampaian Bapak M. Yunius bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi sampai saat ini sudah banyak pengaduan masyarakat mengenai wilayah banjir di Kota Jambi. Untuk mengatasi permasalahan genangan di Kota Jambi, Bidang Sumber Daya Air mempunyai tim penanggulangan masalah tersebut dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Penanggulangan yang dilakukan oleh Bidang SDA Dinas PUPR Kota Jambi untuk masalah banjir pembersihan yang dilakukan lebih mengarah kepada daerah daerah sungai atau anak sungai. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir yaitu:

1. Membuat fungsi sungai dan drainase dapat bekerja dengan baik. Sungai dan Drainase adalah tempat aliran air sehingga jangan sampai tercemar oleh sampah atau menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan drainase tersumbat.

³¹ Wawancara bersama Bapak M. Yunius selaku Kepala Seksi Sumber Daya Air

2. Melakukan reboisasi tanaman khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat.
3. Menyediakan dan memperbanyak lahan terbuka untuk membuat lahan hijau sebagai lahan penyerapan air.
4. Tidak membangun perumahan ditepi sungai, karena mempersempit aliran sungai dan sampah dari perumahan akan dibuang ke sungai.
5. Menghindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga dibantaran sungai. Karena pohon berperan penting dalam pencegahan banjir.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Padjeriosnop sebagai Kepala Seksi Sungai Danau dan rawa

Banjir di depan freshco itu karena tidak ada aliran menuju kepembuangan ke sungai, karena gorong-gorong dibawah jalan itu sudah tersumbat sehingga mampet/sedimentasi, sehingga air yg hendak menyebrang menuju sungai tidak bisa dan akhirnya meluap ke jalan.³²

Dari penyampaian oleh Bapak Padjeriosnop sebagai Kepala Seksi Sungai Danau dan rawa, Genangan banjir yang terjadi di Jalan Pattimura depan Minimarket Freshco tersebut diakibatkan oleh aliran pembuangan air yang tersumbat akibat sedimentasi, sedimentasi sendiri merupakan pengendapan material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Factor dari sedimentasi disebabkan oleh adanya material seperti pasir, tanah atau debu yang menjadi bahan mengendap. Hal tersebut mengakibatkan air tidak dapat dialirkan dengan baik ke sungai terdekat, dan pada akhirnya menggenangi badan jalan. Sedimentasi sendiri merupakan pengendapan sedimen, termasuk semua aktivitas yang mempengaruhi

³² Wawancara Pak Padjeriosnop sebagai Kepala Seksi Sungai Danau dan rawa

dan merubah sedimen menjadi batuan sedimen, proses sedimentasi disebabkan oleh kekuatan alam, seperti hembusan angin , pencairan es dan gletser dan aliran sungai.

Sedimentasi yang mengendap disaluran drainase didepan Freshco menyebabkan saluran mengalami pendangkalan atau pengurangan kapasitas saluran. Sedimentasi pada saluran drainase tidak bisa dihindarkan karena air yang mengalir dan masuk kedalam saluran pasti membawa endapan dan kotoran dari daerah pengaliran saluran atau daerah tangkapan airnya. Selain itu pembungan sampah kedalam saluran yang masih sering terjadi juga menjadi salah satu factor meningkatnya jumlah sedimen didalam saluran drainase. Pembersihan rutin dan penggalian sedimen sangat diperlukan agar kapasitas saluran drainase tetap normal dan tidak berkurang sehingga fungsi drainase tersebut tetap optimal terutama pada musim penghujan.

Daerah lainnya di sepanjang Jalan Pattimura Yaitu di depan Pom Pengisian Bahan Bakar Minyak depan lorong UPCA, peneliti juga mewawancarai Bapak Hendrik Fidrian sebagai Kepala Seksi Drainase dan Irigasi mengatakan Banjir didepan pom bensin simpang pucuk/ UPCA disebabkan karena kepemilikan lahan, ada box yang lika-liku dari pempek slamet. Dulunya pom bensin itu adalah daerah resapan.”³³

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendrik Fidrian sebagai Kepala Seksi Drainase dan Irigasi Wilayah genangan banjir yang terjadi di Depan Pom

³³ Wawancara Bapak Hendrik Fidrian sebagai Kepala Seksi Drainase dan Irigasi Dinas PUPR Kota Jambi



Pengisian Bahan Bakar depan lorong UPCA disebabkan karena kawasan tersebut dahulunya merupakan daerah resapan dan kecilnya drainase untuk mengalirkan air. Daerah resapan berkaitan dengan tempat meresapnya air hujan yang kemudian akan menjadi cadangan air tanah. Fungsi dari daerah resapan air sendiri merupakan untuk menampung debit air hujan yang turun didaerah tersebut. Secara tidak langsung daerah resapan air memegang peran penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan di musim kemarau, sehingga daerah yang sering terjadi geangan saat ini dahulunya meruoakan daerah resapan air, sehingga sekarang tidak ada daerah yang dapat dijadikan tempat untuk resapan air dan mengakibatkan air menggenang kebadan jalan. Factor lain terjadinya genangan didaerah tersebut yaitu kawasan tersebut merupakan dataran rendah sehingga air yang mengalir akan berkumpul ke wilayah tersebut. Faktor tinggi rendahnya suatu daratan menjadi factor yang besar dalam terjadinya banjir, hal tersebut dikarenakan ketika air turun daei daratan yang lebih tinggi tentunya akan semakin laju ketika menuju kebawah, dan apabila drainase pada dataran rendah tersebut kecil maka air yang akan mengalir menjadi lambat dan akan mengakibatkan terjadi genangan.

Untuk daerah selanjutnya yaitu daerah Jalan Gajah Mada Kelurahan Jelutung sering pula terjadi genangan banjir sesuai yang Bapak Padjeriosnop sebagai Kepala Seksi Sungai Danau dan rawa katakan

didaerah gajah mada, dengan banyaknya lika liku sungai, banyaknya permukiman padat, solusi apa yang kita cari, karena pelebaran sungai tidak mungkin, akhirnya kita cari lahan kosong kita adakan untuk pembuatan kolam retensi, tetapi harga yang diberikan msyarakat kepada pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan yang bisa pemerintah berikan karena



pemerintah mengacu pada NJOP (nilai jual objek pajak). Akhirnya rencana menjadi batal.³⁴

Dari hasil wawancara bersama Bapak Padjeriosnop sebagai Kepala Seksi Sungai Danau dan Rawa menjelaskan untuk daerah Kecamatan Jelutung tepatnya di Jalan Gajah mada genangan tersebut terjadi akibat banyaknya permukiman padat penduduk yang mengakibatkan sedikitnya lahan kosong yang dapat digunakan sebagai lahan resapan air. Penduduk yang padat biasanya mengakibatkan rumah penduduk yang berhimpitan tanpa memperhatikan daerah resapan air. . kepadatan penduduk cenderung berdampak pada permukiman yang tidak ramah lingkungan. Meningkatnya jumlah penduduk di daerah Kecamatan Jelutung dapat menyebabkan kerusakan lingkungan asal dari sumber daya alam. Selain disebabkan oleh permukiman padat, genangan yang terjadi di daerah Kecamatan Jelutung tepatnya di Jalan Gajah Mada disebabkan oleh lika liku sungai di daerah tersebut, sehingga air yang mengalir tidak lancar sebagaimana mestinya.

Pembangunan drainase memiliki peran yang sangat penting di kawasan berpenghuni. Sistem drainase yang baik membantu mencegah banyak persoalan, seperti mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanah dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Sistem drainase bisa dikatakan baik apabila bisa berhubungan secara sistematis antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan agar air mengalir atau berjalan dengan baik.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Padjeriosnop sebagai Kepala Seksi Sungai Danau dan rawa



Tabel 1.1 rekap pembangunan bidang SDA Dinas PUPR Kota Jambi³⁵

No	Tahun	Bangunan perkuatan tebing	Tanggul sungai	Pintu air/	Polder/ kolam retensi
1	2017		4.231		
2	2018		5.004		
3	2019		8.414		
4	2020	254	7.170	1	3
5	2021	74	9.387		

Tabel di atas merupakan rekap pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air sejak tahun 2017-2021, pada tahun 2017 pembangunan yang telah dilakukan oleh Bidang SDA yaitu 4.231 tanggul sungai, yang digunakan untuk melindungi daerah irigasi dan banjir yang disebabkan oleh sungai. Pada tahun 2018 telah dilakukan pembanguana tanggul sungai sebanyak 5.004. pada tahun 2019 telah dibangun 8.414 dan setiap tahunnya dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pembangunan tidap tahunnya untuk membuat tanggul sungai. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pembangunan pada bangunan perkuatan tebing yang berfungsi sebagai perkuatan lereng/tebing bangunan adalah bangunan yang ditempatkan pada permukaan suatu lereng guna melindungi suatu tebing sungai terhadap gerusan arus yang dapat mengakibatkan terjadinya gerusan pada tebing dan dasar sungai. Selanjutnya juga sbanyak 7.170 pembangunan tanggul sungai, 1 pintu air yaitu banguna penunjang pada suatu bendungan yang

³⁵ Arsip bidng SDA Dinas PUPR Kota Jambi tahun, wawancara dengan Bapak Penli sebagai staff Bidang SDA

difungsikan untuk mengatur air di sungai, bendungan penahan banjir, maupun tanggul sungai, dan 3 polder/kolam retensi yaitu kolam atau waduk penampung air hujan dalam jangka waktu tertentu yang berfungsi untuk memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air atau sungai. Dan pada tahun lalu yaitu tahun 2021 telah dilaksanakan pembangunan 74 bangunan penguat tebing dan 9.387 tanggul sungai. Sejauh ini pembangunan terus dilakukan setiap tahunnya pembangunan dan pemeliharaan drainase baik itu Normalisasi sungai, pembuatan *box culver* pembuatan penguatan tebing, tanggul sungai, pintu air dan kolam retensi agar ketika turun musim hujan debit air bisa ditampung oleh sungai dan langsung dialirkan ke sungai batang hari sehingga air hujan yang turun dari langit ketika musim penghujan dapat langsung meresap ke dalam tanah dan tidak akan ada genangan air di jalan raya yang bisa mengakibatkan terjadinya banjir di sebagian titik-titik tertentu di Kota Jambi, sehingga ketika musim penghujan datang Jambi terhindar dari bencana banjir dan kemacetan jalan diakibatkan menggenangnya air.

B: Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang Wilayah Kota Jambi yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Drainase.

1. Faktor pendukung

a) Sumber daya Finansial

Ketika sumber daya manusianya sudah memadai, dan berkompeten akan menjadi salah satu faktor pendukung dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan suatu program kebijakan mustahil berjalan



sesuai dengan rencana jika anggaran dana tidak mampu mengakomodir. Sumber daya finansial dapat menjadi factor utama untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana. Dana yang tercukupi untuk pembangunan drainase akan membuat proses pembangunan berjalan dengan baik dengan terpenuhinya dana untuk melanjutkan pembanguna drainase tersebut.

Hal yang seragam dikemukakan Wawancara bersama Bapak M. Yunius selaku Kepala Seksi Sumber Daya Air

Skalanya untuk mengerjakan suatu proyek itu 50 juta>200 juta itu jika paket kecil. Jika sudah lebih 200 juta itu paket besar. Untuk skala kecil perkiraan waktu pengerjaannya kurang lebih 3 minggu, jika diatas 2 miliar skala besar perkiraan waktu pengerjaannya bisa sampai 3-4 bulan.³⁶

Hasil wawancara bersama Bapak M. Yunius selaku Kepala Seksi Sumber Daya Air dari segi biaya untuk anggaran per-proyek tidak ada permasalahan karena sudah dianggarkan melalui APBD Jambi dan APBN. Jika dilihat dari hal tersebut permasalahan drainase baik yang dibagian Hulu sampai dengan yang Hilir tidak akan mengalami kesulitan pada bagian penyediaan atau pada masa pemeliharannya. Dengan demikian peran dana dalam pembanguna drainase sangatlah penting, dengan tercukupinya dana maka pembangunan dapat segera terlaksana tanpa adanya kendala. Sumber dana dalam pembangunan tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

³⁶ Wawancara bersama Bapak M. Yunius selaku Kepala Seksi Sumber Daya Air



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

b) Sumber Daya Waktu

Sumber daya lainnya dalam pelaksanaan implementasi yakni sumber daya waktu. Sumber daya waktu adalah salah satu faktor penting sebagai penentu keberhasilan suatu kebijakan, ketika sumber daya manusia telah berkualitas dan anggaran dana tersebut dalam kegiatan terpenuhi, namun waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut terlalu sedikit dari jumlah waktu yang seharusnya diberikan, maka pelaksanaan waktu pengerjaan dalam penyediaan prasarana drainase tidak dapat di pukol rata akan waktu pengerjaannya. Semua tergantung pada besar kecil ukuran prasarana yang dibangun.

Seperti yang diungkapkan oleh Padjerosnop, Kasi bagian Sungai Danau dan RAWA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi :

Itu tadi Tergantung pakatnya, minimal waktu penunjukan waktu itu bisa 2 bulan. Penunjukan langsung itu mekanismenya kito mengundang perusahaan-perusahaan yang biaso mengerjakan saluran untuk tendernyo, tender langsung pada skala 50 juta>200 juta untuk paket kecil. Kalau waktu pengerjaannyo diperkirakan cuman 3 minggu, jika diatas 2 miliar skala besar perkiraan waktu pengerjaannya bisa sampai 3-4 bulan.³⁷

Waktu pengerjaan yang digunakan untuk pengerjaan sistem jaringan drainase untuk satu proyek berkisar 4 bulan, apabila dihitung program utama dalam Peraturan Daerah 5 tahun agar dapat meningkatkan kapasitas jaringan drainase mikro dan tempat-tempat yang belum terlayani. Akan tetapi hingga saat ini yang peneliti lihat banyak saluran drainase masih dalam keadaan yang masih

³⁷ Padjerosnop, Kasi bagian Sungai Danau dan RAWA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi

kurang baik, akibatnya ketika musim penghujan datang jalanan akan tergenang air cukup tinggi di beberapa titik Kota Jambi.

c) Sumber Daya manusia

Keberhasilan dari proses implementasi Kebijakan sangat tergantung bagaimana kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting didalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi mengharuskan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disayartakan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Sumber Daya Manusia mempunyai dua peran, baik sebagai obyek umum namun sekaligus sebagai obyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, Sumber Daya Manusia merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek, Sumber Daya Manusia berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan. Dengan Sumber Daya Manusia yang terampil, manufaktur dalam negeri akan dapat lebih berdaya saing baik di tingkat domestic maupun global seiring perkembangan teknologi terkini.

Dalam hal ini bidang Sumber Daya Air Kota Jambi melalui Hendrik fidrian selaku Kepala seksi Drainase dan Irigasi menerangkan bahwa “selain menggunakan dana dari APBD dan APBN, Kota Jambi juga menggunakan jasa Swasta untuk membantu mengerjakan pembangunan kontruksi drainase, selain itu juga bekerja sama dengan pihak provinsi didalam normalisasi pengerukan sungai.”³⁸

³⁸ Wawancara dengan Bapak Hendrik fidrian selaku Kasi Drainase dan Irigasi

Peran sektor swasta dalam pembangunan sangat ditubuhkan karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam membiayai proyek strategis sementara hasil yang diharapkan dari proyek tersebut dibutuhkan segera mengingat semakin beragamnya kebutuhan masyarakat. Untuk Finansial di dalam mengimplementasikan kebijakan diperkirakan cukup telah memenuhi dikarenakan bidang Sumber Daya Air Kota Jambi langsung melibatkan pihak ketiga yakni swasta dan provinsi demi terselenggaranya program demi program yang sudah dicanangkan.

2. Faktor penghambat

a) Faktor pembebasan lahan

Pembebasan lahan adalah faktor utama yang paling sering timbul di dalam menjalankan suatu kebijakan dikarenakan kurangnya peran pemerintah di dalam mensosialisasikan suatu program pembangunan, hal tersebut terjadi sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk melepas sebagian lahan mereka untuk kepentingan umum.

Seperti yang di sampaikan Padjeriosnop, Kasi bagian Sungai Danau dan Rawa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi:

Untuk faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Pemerintah Jambi Tentang Tata Ruang Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Jambi. Khususnya pada Sistem Drainase, permasalahan didalam pembangunan yang sering terjadi pasti masalah lahan, Yang menjadi permasalahan kami pertama yaitu mengenai Lahan, pembebasan lahan karena perlu kajian peraturan pemerintah. Contoh didaerah gajah mada, dengan banyaknya lika liku sungai, banyaknya permukiman padat, solusi apa yang kita cari, karena pelebaran sungai tidak mungkin, akhirnya kita cari lahan kosong kita adakan untuk pembuatan kolam retensi, tetapi harga yang diberikan masyarakat kepada pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan yang bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



pemerintah berikan karena pemerintah mengacu pada NJOP (nilai jual objek pajak). Akhirnya rencana menjadi batal.³⁹

Pembebasan lahan masih menjadi kendala terbesar Pemerintah Kota Jambi didalam menjalankan kebijakan, masyarakat yang sulit diajak berdiskusi mengenai lahan mereka yang akan digunakan untuk membangun drainase karena mereka beranggapan bahwasanya lahan yang mereka gunakan ganti ruginya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.

Masalah pembebasan lahan dalam pembangunan drainase hingga kini masih menjadi kendala, banyak pembangunan proyek infrastruktur yang jadwal penyelesaiannya terhambat akibat menunggu pembebasan lahan selesai. Karena belum tuntasnya masalah lahan tersebut pada akhirnya dapat mempersulit bahkan menggagalkan pembangunan drainase. Padahal, masalah pembebasan lahan dalam proyek pembangunan drainase biasanya dapat menjadi beban pemerintah dalam pengadaannya. Yang terjadi dilapangan adalah warga menentukan harga ganti rugi yang tinggi. Namun biaya yang akan dibayarkan untuk mengganti lahan mereka oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga yang diberikan warga. Dengan tidak cocok dalam pembayaran tersebut maka akan menyebabkan pekerjaan proyek terhambat. Pada akhirnya, pemerintah kesulitan untuk membangun infrastruktur.

Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia 65 Tahun 2006 Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan

³⁹ Wawancara dengan bapak Padjeriosnop, Kasi bagian Sungai Danau dan Rawa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi



berdasarkan penilaian Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia.

b) Faktor dana

Faktor dana juga menjadi salah satu kendala pada pembangunan drainase di kota Jambi. Dana yang diperlukan untuk sangat besar apabila ingin memperbaiki keseluruhan sistem drainase agar tidak ada lagi terjadi genangan banjir, seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Yunius selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air mengatakan “Pengaduan sudah banyak, tetapi pemerintah untuk menyelesaikan masalah tadi tidak bisa semudah itu, karena kita punya proses dan punya kajian punya waktu dan juga perlu dana.”⁴⁰

Pembangunan saluran drainase memerlukan biaya, tetapi mengestimasi biaya membutuhkan data perencanaan secara detail, perlu analisa biaya material, tenaga kerja, alat dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan demikian diperlukan dana yang tidak sedikit dalam melakukan pembangunan, apabila dana yang telah direncanakan tidak terpenuhi maka pembangunan belum dapat dilaksanakan.

Dana memiliki factor penting dalam berlangsungnya pembangunan drainase, biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan sangat besar oleh karena itu apabila dana kurang memadai maka pembangunan akan terkendala dalam pengoperasiannya. Berkaitan dengan kendala pembebasan lahan, biaya yang diminta oleh pihak yang memiliki tanah tinggi sehingga dana yang sudah diperkirakan sejak awal, maka akan melebihi perencanaan awal.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak M. Yunius selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air

5 Faktor Sampah

Sampah menjadi Faktor utama dari masalah terjadinya genangan-genangan di beberapa titik jalan Kota Jambi, sampah yang menumpuk akan membuat air tertahan di saluran yang tidak lancar, kesadaran masyarakat yang kurang di dalam membuang sampah harus di tempat pembuangan akhir (TPA), selain mencemari sungai, pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air tanah.

Pengelolaan sampah harus mendapatkan perhatian yang lebih seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sebab sampah berperan besar terhadap pendangkalan dan penyempitan saluran drainase dan juga sungai. Pendangkalan dan penyempitan menyebabkan saluran drainase tak mampu menampung debit air sehingga muncuk genangan bahkan banjir. Pembuangan sampah sembarangan serta banyaknya sampah yang belum dikelola dengan baik mengakibatkan sumbatan drainase hingga menimbulkan banjir. Akibat banyaknya tumpukan sampah tersebut, maka banjir akan meluap semakin tinggi dan menimbulkan kerusakan serta kerugian material.

Hal serupa juga di sampaikan Padjerosnop, Kasi bagian Sungai Danau dan Rawa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jambi:

Sampah jadi salah satu penyebab terbesar terjadinya banjir genangan ini, pasti penyebabnya masyarakat buang sampah, karena salah satu penyebab banjir itu ada beberapa hal bukan dari sampah saja, antara lain sedimentasi, daerah itu ditumbuhi rumput liar jarang dibersihi oleh masyarakat penyumbatan sampahlah yang membuat aliran air sehingga mengakibatkan banjir⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Padjerosnop, Kasi bagian Sungai Danau dan Rawa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi

Dari hasil wawancara bersama Bapak Padjeriosnop sebagai Kepala Seksi Sungai Danau Dan Rawa partisipasi masyarakat kurang didalam memelihara Drainase yang telah dibangun sedemikian rupa, masyarakat beranggapan bahwasanya yang bertanggung jawab penuh semuanya ialah pemerintah namun hal tersebut sebenarnya tidak. Setiap pembangunan apapun bentuknya yang kembalinya untuk masyarakat sehingga masyarakat wajib untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah.

Pembuangan sampah yang sembarangan secara tidak langsung berhubungan dengan penyebab banjir yang pertama, yakni hujan. Hal tersebut karena air hujan tidak bisa mengalir disungai dan drainase jika tersumbat dengan banyaknya sampah sehingga air hujan tersebut meluap kejalan. Kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Tidak hanya menjadi kotor, membuang sampah sembarangan juga dapat menghambat saluran drainase.

Dalam hal ini Dinas Sumber Daya Alam juga telah melakukan sosialisasi terkait banjir yang sering terjadi di Kota Jambi, sosialisasi yang dilakukan adalah dengan memberikan pengetahuan dan peringatan mengenai efek dari membuang sampah sembarangan. Dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air berharap agar sosialisasi yang mereka lakukan akan menyadarkan masyarakat tentang dampak membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan.

d) Pertumbuhan Jumlah penduduk

Selain sampah dan sedimentasi. Pertumbuhan Jumlah Penduduk juga menjadi salah satu factor yang menjadi penghambat di dalam menjalankan



Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 terutama permasalahan jaringan Sistem Drainase.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Padjeriosnop, Kasi bagian Sungai Danau dan Rawa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi:

perencanaan penampang drainase yang dulunya Kota Jambi ini pemukimannya sedikit misalnya perencanaanya sekian meter, sedangkan sekarang permukiman sekarang ini bertambah sedangkan penampang tetap segitu. Jadi sekarang kami sedang mengusahakan menghitung lagi ulang debit air yang masuk ke saluran drainase yang ada untuk evaluasi dan pelebaran drainase yang lama.⁴²

Dari hasil wawancara bersama Bapak Bapak Padjeriosnop, Kasi bagian Sungai Danau dan Rawa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi disimpulkan bahwasanya pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Jambi yang menjadi Faktor penghambat disebabkan pembangunan Drainase yang sebelum tumbuh pesatnya penduduk Jambi penampang tersebut Kecil, sedangkan setelah bertambahnya jumlah penduduk, akibatnya ukuran drainasenya masih seperti yang sebelumnya tidak ada penambahan luas jaringan sistem drainase.

Kepadatan penduduk dapat membuat lahan semakin sempit, lingkungan hijau menjadi berkurang. Apabila penduduk tidak mmeiliki kesadaran untuk merawat lingkungan, maka penduduk akan membuat sampah sembarangan, membuang limbah sembarangan, dan populasi orang yang menggunakan kendaraan akan meningkat, semua akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Semakin banyaknya penduduk berarti sama dengan semakin banyak

⁴² Wawancara bersama Bapak Padjeriosnop, Kasi bagian Sungai Danau dan Rawa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jambi

rumah, sehingga orang-orang harus membuat rumah, dan akan merelakan kebun serta lahan kosong untuk dijadikan rumah,

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

Dari urain uraian pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab diatas, maka akhirnya sampailah penulis kepada kesimpulan yang merupakan inti dari skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

1. Pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase, Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase, Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase, serta Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan di Jambi yang dilakukan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi telah berjalan namun belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi genangan banjir hingga tahun ini.
2. Faktor Pendukung dari Implementasi Rencana Tata Ruang Nomor 09 Tahun 2013 Tentang RTRW Tentang Pembangunan Drainase yaitu sumber daya dana, sumber daya waktu, dan sumber daya manusia.
- Faktor Penghambat Pembangunan Drainase yaitu factor pembebasan lahan yang, factor dana, factor sampah, dan pertumbuhan jumlah penduduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran agar Pemerintah Kota Jambi didalam membangun drainase semakin optimal antara lain :

1. Melaksanakan pembangunan pada daerah-daerah yang sering terjadi genangan
2. Sosialisasi keseluruh wilayah Jambi melalui Kepala kecamatan masing-masing wilayah yang meliputi :Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Pallmerah, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Telanai Pura, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Baru dan Kecamatan Alam Barajo. Mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan saluran drainase, serta penting adanya saluran drainase. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.
3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala pada saluran drainase yang sudah ada. Pemeliharaan drainase dilakukan dengan mempertimbangkan curah hujan yang terjadi di Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Daftar Pustaka

a. literature

- AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005) , hlm. 90-92.
- Ahok Alpa Beta, "Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 1 (2017): 1–6.
- Dani Andriyanto, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, *Skripsi Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin UIN Raden Intan Lampung*
- Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Implementasi Program Emas (Expanding Maternal and Neonatal Survival) Sebagai Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Tegal, *Journal of Politic and Government Studies*, 2016.
- Ekky Maria Farida Sani, Pemanfaatan Buletin Pustakawan oleh Pustakwandi Kota Semarang , *jurnal ilmu perpustakaan*, Vol. 2, No. 3 (2013)
- Genest-Gregoire (dkk), *Asumsi Keberlanjutan dalam Reformasi Manajemen Perfomance: Merevisi Pola Pelaksanaan*, Tinjauan Organisasi Publik, 23 (Agustus), 2018.
- Helen Sabera Adib, Teknik Pengembangan Instrumen Penelitian Ilmiah di Perguruan Tingo Keagamaan Islam, *jurnal Unimus*
- Iham Junaidi, Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata, *Jurnal Kepariwisata*, Vol. 10, No. 1 (2016)
- Leo Agustino, PH.D, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 128.
- M. Farqi Khair, EVALUASI SISTEM DRAINASE DI KAWASAN SEKITAR STADION TELADAN KOTA MEDAN
- Mardawarni, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) Hlm. 66-67
- Mustakim, *Skripsi Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tentang Pembangunan Drainase Tahun 2014-2018*, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
- Randi Syaputra, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi*, *Skripsi* , Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi 2019

Riswandi Umar, Implementasi Rencana Tata Ruang Permukiman Dan Arah Kebijakan Pembangunan Di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

Sinclair P (dkk), *Efektifnya e-learning berbasis Internet tentang Perilaku Dokter dan Hasil Pasien: protokol peninjauan sistematis*, database JBI dari tinjauan sistematis dan laporan implementasi, Januari, 2015.

Yessi Harnani dan Zulmeliza Rasyid, *Statisti dasar kesehatan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) Hlm. 14

Yudi Mardiansyah, EVALUASI SISTEM DRAINASE KAMPUS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

b. undang-undang

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 1 Tahun 2018

Permen PU No 12 Tahun 2014 Tentang Drainase perkotaan

Peraturan Wali Jambi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi

c. internet

<https://www.rumah.com/panduan-properti/panduan-lengkap-rencana-tata-ruang-wilayah-18523>

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/drainase/DRAINASE_15-71-2015.pdf

<https://lintastungkal.com/hujan-deras-sejumlah-titik-di-kota-jambi-ini-langsung-banjir-motor-warga-mogok/>

<https://jambiprov.go.id/berita-pjgubernur-hadiri-peringatan-hut-kota-jambi.html>

<https://www.otosia.com/berita/rencana-tata-ruang-wilayah-pengertian-fungsi-jenis-dan-manfaat-klm.html>

<http://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/2020/06/27/pengertian-dan-jenis-jenis-perencanaan-tata-ruang/>

<https://jambikota.bps.go.i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Jambi

JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Tahun 2021-2022																														
		Juli				Januari				Maret				April				Juni				Juli				Agustus						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pengajuan Judul			x																												
2	Pembuatan Proposal				x																											
3	Perbaikan Proposal dan Seminar					x	x	x	x																							
4	Surat Izin Riset												x																			
5	Pengumpulan Data												x	x	x																	
6	Pengolahan dan Analisis Data																x	x														
7	Bimbingan dan Perbaikan																				x	x	x	x								
8	Agenda dan Ujian Skripsi																								x	x						
9	Perbaikan dan Penjilidan																												x	x	x	x

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber aslinya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunanpaizin Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar izin UIN Sunanpaizin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tir
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lampiran

wawancara bersama Bapak Padjeriosnop sebagai Kepala Seksi Sungai Danau dan rawa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tir
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



o milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tir
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

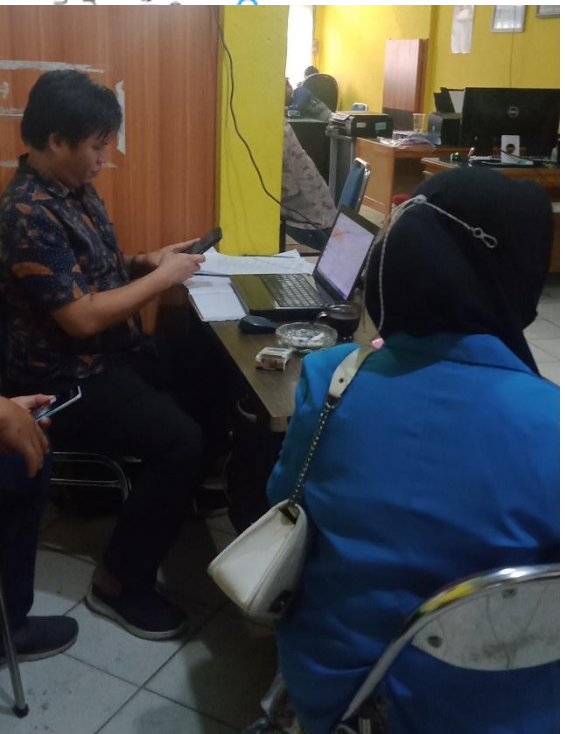


Wawancara bersama bapak M Yunius sebagai Kepala Bidang SDA

Islamic University of Sulthan Thaha Sa
kan da menyebutkan sumber asli:
a ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tir
uk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Un
1. Dilarang mengutip se
a. Pengutipan hanya
b. Pengutipan tidak m
2. Dilarang memperban

o milik UIN Sultha Ja



o milik UIN Sutha Ja
Hak Cipta Dilindungi Un
1. Dilarang mengutip se
a. Pengutipan hanya
b. Pengutipan tidak m
2. Dilarang memperban

omic University of Suthan Thaha S
o menyebutkan sumber asli:
h, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tir
apun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	M. Yunius	Kepala Bidang SDA
2	Padjenosnop	Kasi sungai danau dan rawa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

3	Hedrik	Kasi Drainase dan sungai
4	Venly	Staff bidang SDA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tiru
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tir
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B- 1230 /D.II.1/PP.00.11/3/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 07 Maret 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas PUPR Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Meliani**
NIM : 105180018
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 di Kota Jambi (Studi Kasus Jalan Kapten Patimura Kelurahan Kenali Besar)**

Lokasi Penelitian : Dinas PUPR Kota Jambi
Waktu Penelitian : 07 Maret 2022 – 07 Mei 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tir
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Telp/Fax : (0741) 40553

J A M B I

Jambi, 05 April 2022

Nomor : PEG.04.00/351/I.1-DPUPR/2022 Kepada Yth :
 Lampiran : - Dekan Universitas Islam Negeri
 Perihal : **Persetujuan Pengambilan** Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Data Penelitian Fakultas Syariah
 di -
 J a m b i

Menindak lanjuti Surat Dekan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Nomor: B-1230/D.II.1/PP.00.1 1/3/2022 Tanggal 07 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan Judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA JAMBI TAHUN 2013-2033 DI KOTA JAMBI (Studi Kasus Drainase Jalan Kapten Pattimura dan Jalan Mayor Abdul Kartawirana)**, maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk Pengambilan Data penelitian. Adapun nama Mahasiswa nya sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Meliani	105180018	Ilmu Pemerintahan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tiruan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Curriculum vitae



A. Informasi Diri

Nama : Meliani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tangkit Baru, 30 Juli 2000
NIM : 105180018
Alamat : Jl. Kapak RT 10 Tangkit Baru Dusun Selamat Jaya, kec. Sungai Gelam
Agama : Islam
No telp/hp : 085268115498

Nama Ayah : Azis

Nama Ibu : Nurbaina

Angkatan Tahun : 2018

B. Riwayat Pendidikan

- 1. SD N 84 Muaro Jambi : 2006-2012
- 2. SMPN 15 Kota Jambi : 2012-2015
- 3. SMA N 9 Kota Jambi : 2015-2018
- 4. UIN STS Jambi Prodi Ilmu Pemerintahan (2018-Sekarang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah
b. Pengutipan tidak mengizinkan penggunaan kembali secara komersial atau untuk tujuan lain tanpa izin UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menggandakan secara elektronik atau mekanis sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Sutha Jambi